

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS MBS

Harleli¹, Insan Islamanto², Nurrahman³, Nur Afif⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Email: zalifasya@gmail.com, insanislamanto07@gmail.com, nrrahman80@gmail.com,
nurafif@ptiq.ac.id

Article History

Received: 09-07-2024

Revised: 10-8-2024

Published: 06-09-2024

Keywords: Plans,

Development, Schools

Abstract: *The school development plan based on SBM (School Based Management) is a strategic plan that focuses on strengthening schools as centers for effective decision making to improve the quality of education. The SBM concept emphasizes the importance of active involvement of all school stakeholders, including teachers, administrative staff, students, parents and the community, in the decision-making process and implementation of development programs. In contrast to the concept of External Control Management which makes parties outside the school, namely the government, the absolute and sole determinant of policy so that the school does not have broad authority. As a form of autonomy, school development plans can be implemented based on existing data and needs so that schools can develop positively. School development plans can be analyzed through surveys conducted on internal parties, namely teachers, education staff, students and parents, as well as input from external parties, namely the community and government.*

Kata kunci: Rencana, Pengembangan, Sekolah

Abstrak: Rencana pengembangan sekolah berbasis MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) merupakan rencana strategis yang difokuskan pada penguatan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Konsep MBS menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sekolah, termasuk guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Berkebalikan dengan konsep Manajemen Kontrol Eksternal (MKE) yang menjadikan pihak luar sekolah yaitu pemerintah sebagai penentu kebijakan secara mutlak dan tunggal sehingga sekolah tidak memiliki kewenangan yang luas. Sebagai bentuk otonomi, rencana pengembangan sekolah dapat dilaksanakan berbasis data dan kebutuhan yang ada sehingga sekolah dapat berkembang secara positif. Rencana pengembangan sekolah dapat dianalisis melalui survey yang dilakukan kepada pihak internal yaitu guru, tenaga kependidikan, siswa dan orangtua juga masukan dari pihak eksternal yaitu masyarakat dan pemerintah.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan formal, non-formal, dan informal kepada individu di berbagai tingkat usia. Perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi signifikan seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan pemerintah, dan tuntutan masyarakat. Merujuk pada data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



(Kemendikbud Ristek) pada semester ganjil 2023-2024 terdapat 436.707 sekolah di Indonesia. Walaupun data tersebut hanya menyajikan jumlah dari lembaga pendidikan formal saja, namun dari data tersebut dapat terlihat banyaknya jumlah lembaga pendidikan di Indonesia, dan tentu akan terdapat banyak pula persaingan mutu pendidikan yang diunggulkan di masing-masing sekolah. Dengan meningkatnya jumlah sekolah memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatifnya, diantara dampak positifnya, wali murid memiliki banyak pilihan dalam menentukan sekolah sebagai tujuan pendidikan anak mereka, sedangkan dampak negatifnya terdapat banyak persaingan pada lembaga pendidikan sehingga hal itu berdampak pada berkurangnya jumlah murid di beberapa sekolah yang pada akhirnya menyebabkan banyak sekolah yang tidak dapat lagi beroperasi dan ditutup, oleh karena itu setiap sekolah hendaknya memiliki keunggulan yang dapat ditonjolkan sehingga dapat menjadikan sekolah tersebut sebagai pilihan wali murid dan peserta didik.

Rencana pengembangan sekolah berbasis MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen sekolah agar dapat merancang rencana pengembangan sekolah sebagai bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS) sehingga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan. Selain itu, rencana pengembangan sekolah berbasis MBS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan dengan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan sumber data dari studi literatur dan tinjauan literatur yang berkaitan dengan rencana pengembangan sekolah berbasis MBS. Metode deskripsi kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang realitas sosial yang akan diteliti dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, serta mampu menentukan ciri-ciri, sifat, sifat, dan model dari fenomena yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Definisi Rencana Pengembangan Sekolah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan pada umumnya dipahami sebagai pertumbuhan, perubahan bertahap (evolusi),

atau pola perubahan bertahap. Menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012), pengembangan tidak hanya berfokus pada analisis kebutuhan, tetapi juga pada isu-isu umum analisis start-end, seperti analisis konteks. Tujuan pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan hasil uji lapangan. Sedangkan menurut Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012), pengembangan mengacu pada proses mengubah atau menggambarkan spesifikasi desain ke dalam bentuk sifat fisik. Pengembangan mengacu secara khusus pada proses penciptaan materi pembelajaran. Menurut Vitalis, Pengembangan berarti upaya menjadikan usaha menjadi besar, berkelanjutan, tangguh, dan inovatif. Dalam konteks lembaga pendidikan/sekolah, pengembangan merupakan upaya untuk menjadikan sebuah sekolah menjadi semakin “great” (berkembang/besar/tangguh) dan excellence (unggul). “Great” baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Excellence dalam arti upaya untuk menjadikan sebuah lembaga pendidikan/sekolah sebagai institusi yang unggul/ulung/terdepan/memiliki prestasi sangat baik.

Adapun Rencana pengembangan sekolah atau *school development planning* adalah upaya untuk menjadikan sekolah menjadi lebih baik, serta untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan. Rencana pengembangan sekolah disusun agar sekolah terus-menerus meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah dengan MBS (manajemen berbasis sekolah), yang bertujuan untuk memerdekakan sekolah dan memerdekakan pendidikan, namun tetap merujuk pada tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Sasaran Pengembangan Sekolah

Sasaran pengembangan mencakup beberapa aspek, diantaranya; aspek tata kelola lembaga, aspek pengaturan lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana, aspek pengajaran, dan aspek SDM. Pengembangan Sekolah pada Aspek Tata Kelola Lembaga meliputi upaya peningkatan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, kepemimpinan, akuntabilitas dan transparansi, struktur organisasi, sistem pemantauan dan evaluasi, komunikasi dan koordinasi, standar mutu, dan sistem penjaminan mutu.

Dari segi aspek pengembangan lingkungan sekolah, sarana prasarana terdiri dari penataan fisik dan non fisik di lingkungan sekolah. Adapun lingkungan non fisik seperti estetika, kerapian, kebersihan, sedangkan tampilan fisik berupa bangunan, fasilitas, seragam, logo, simbol yang digunakan, dan lain-lain. Manajemen sarana prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengembangan sekolah berbasis MBS. Menurut Mujamil Qomar dalam Irjus Indrawan sarana prasarana sekolah sebaiknya dikelola dengan mengikuti pedoman kebutuhan sekolah, yaitu: *pertama*, lengkap, siap dipakai setiap saat dan awet; *kedua*, rapi,

bersih dan asri; *ketiga*, kreatif, inovatif dan bervariasi sehingga dapat menumbuhkan imajinasi peserta didik; *kempat*, memiliki jangkauan yang panjang, untuk menghindari bongkar pasang bangunan, *kelima*, memiliki tempat khusus beribadah maupun melakukan kegiatan religi lainnya. Pada aspek pengajaran meliputi upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui kurikulum dan perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran evaluasi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran serta intervensi kelas. Dalam pengembangan pada aspek pengajaran dapat ditingkatkan dengan dilakukan supervisi yang rutin dan berkelanjutan, Suhertian dalam FA Pasha mengemukakan, supervisi akademik yang mampu memperbaiki kualitas kinerja guru adalah yang dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip sistematis, terencana dan kontinyu.

Pada pengembangan aspek SDM, perlunya memperhatikan perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen pegawai, seleksi pegawai, orientasi, penempatan pegawai, kompensasi dan perlindungan pegawai, pengembangan, evaluasi, dan pemberhentian. Sumber daya manusia merupakan aset sekolah yang paling penting, sehingga aspek-aspek tersebut penting untuk diperhatikan. Jika sumber daya manusia tidak diperhatikan maka lembaga pendidikan akan sulit berkembang. Ranu Pandoyo dan Suad Husnan dalam Achmad Sudira mendefinisikan fungsi operasional sumber daya manusia yang pertama adalah pengadaan dan perekrutan tenaga kerja bagi keperluan organisasi.

1.3 Faktor Pendukung Pengembangan Sekolah

Seiring dengan berjalannya sebuah lembaga pendidikan dari tahun ke tahun, tentu akan dibutuhkan pengembangan pada sebuah lembaga pendidikan, baik pada aspek sarana prasarana, sumber daya manusia, pengajaran, kurikulum dsb. Lembaga pendidikan dengan sistem yang baik tentu akan melakukan kegiatan supervisi dan evaluasi yang dijalankan dengan rutin, baik supervisi akademik, administrasi, maupun supervisi manajerial, dan dari hasil supervisi akan dievaluasi dan didapati hasil bagian-bagian mana yang harus dikembangkan agar dapat meningkat mutu pendidikan di sebuah sekolah ataupun lembaga pendidikan.

Dalam mengembang sekolah dibutuhkan beberapa faktor pendukung, yang mana dari faktor-faktor pendukung ini akan dibutuhkan peran pimpinan atau manajemen sekolah agar rencana pengembangan berjalan dengan efektif. Adapun faktor-faktor penunjang rencana pengembangan sekolah, yaitu;

Pertama, Pemimpin yang memiliki kesadaran bahwasanya pengembangan dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan adalah sebuah kebutuhan, dan membuka diri terhadap perubahan pada aspek-aspek yang dibutuhkan, sehingga akan ada perbaikan pada

mutu lembaga tersebut. *Kedua*, Semua SDM memiliki komitmen untuk bekerja sama dalam mengambil tindakan pengembangan lembaga pendidikan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolah perlunya keterlibatan semua pihak baik internal maupun eksternal; yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, siswa, orang tua, komite sekolah, alumni, pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Ketiga, Lembaga pendidikan atau sekolah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta memiliki komitmen untuk membawa organisasi pada visi misi yang diinginkan.

Keempat, Lembaga hendaknya memiliki tim yang solid dan dapat bekerja sama serta memiliki kemampuan, pengalaman dan komitmen. Kerja sama yang baik dalam sebuah tim tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja anggota organisasi. Irwandi Ardi Wijaya, Rosida Apriliana Shahirah, dan Margartha Evi Yuliana berpendapat, dari segi keefektifan bekerja, kerjasama tim lebih efektif dibandingkan dengan individu. Hal ini disebabkan, pada proses kerjasama tim, para pegawai ataupun karyawan dapat menerima masukan, sanggahan, kritik, ataupun saran yang baik dan juga memotivasi, sehingga dapat terjadi proses tukar pikiran antara satu individu dengan individu yang lain.

Kelima, Merubah budaya sekolah. Merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di sebuah organisasi ataupun lembaga pendidikan bukanlah sesuatu yang mudah, namun bukan berarti hal itu tidak dapat dilakukan. Nasution dalam Vitalis Tarzan mengemukakan, perlunya perubahan budaya dalam upaya melakukan pengembangan sekolah agar hal hal yang direncanakan bisa berjalan sesuai tujuan, mengubah pola pikir, memelihara kepercayaan, serta meningkatkan etos kerja dan produktivitas organisasi.

3.4. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah

RPS memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting terhadap eksistensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. tujuan secara umum oleh sekolah antara lain:

1. Sebagai dasar bagi sekolah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Sebagai dasar bagi sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai keberhasilan sekolah dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Sebagai dasar bagi sekolah untuk menentukan langkah-langkah strategis untuk mengubah kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang diharapkan.
3. Sebagai dasar bagi sekolah untuk melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam rangka memperoleh umpan balik untuk memperbaiki rps selanjutnya.
4. Memberikan gambaran bagi *stakeholder* sekolah khususnya orang tua siswa, masyarakat

terhadap segala bentuk program yang akan diselenggarakan oleh sekolah.

Tujuan secara khusus penyusunan RPS yang disusun oleh sekolah antara lain:

1. Menjamin perubahan tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
2. Mendukung koordinasi antar warga sekolah dengan *stakeholder* yang terkait.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di antara warga sekolah.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.5. Proses penyusunan rencana pengembangan sekolah

Dalam penyusunan RPS harus menerapkan prinsip-prinsip: memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan atau pengembangan), sistematis, terarah, terpadu (saling terkait & sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven (berdasarkan kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil review dan evaluasi.

1. Penyusunan dan pelaksanaan RPS

Faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sekolah yang baik akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya. Sedangkan perencanaan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap implementasinya. Oleh karena itu dalam setiap membuat RPS, sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan masa datang.

2. Langkah-langkah Penyusunan RPS: Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop)

RPS berisi dua rencana pengembangan pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekolah dalam jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah dalam jangka pendek (satu tahunan). Renstra menggambarkan suatu perencanaan pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program-program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non fisik, yang semuanya mengacu kepada SNP. Sedangkan Renop merupakan bagian tak

terpisahkan dari Renstra, dan lebih merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Program-program dalam Renop lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun.

Dengan demikian Renstra dibuat pada awal tahun untuk lima tahun mendatang, sedangkan Renop dibuat pada tahun pertama dari lima tahun yang akan dilaksanakan. Baik dalam Renstra maupun Renop semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal program, baik Renstra maupun Renop harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat.

a. Langkah-langkah penyusunan Renstra dalam RPS:

- 1) Melakukan analisis lingkungan strategis
- 2) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini
- 3) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan lima tahun ke depan
- 4) Menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang diharapkan lima tahun kedepan.
- 5) Merumuskan visi sekolah
- 6) Merumuskan misi sekolah
- 7) Merumuskan tujuan sekolah selama lima tahun kedepan
- 8) Merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah (lima tahun)
- 9) Menentukan strategi pelaksanaan
- 10) Menentukan milestone (output apa dan kapan dicapainya)
- 11) Menentukan rencana biaya (alokasi dana)
- 12) Membuat rencana pemantauan dan evaluasi

b. Langkah-langkah penyusunan Renop dalam RPS

Renop disusun berdasarkan Renstra, dan tidak boleh menyimpang dari Renstra. Sehingga antara Renstra dan Renop harus terkait dan ada benang merahnya. Renstra dan Renop inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan, dan pembimbingan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah.

Adapun langkah-langkah penyusunan Renop adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah.
- 2) Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini
- 3) Melakukan analisis pendidikan sekolah satu tahun ke depan (yang diharapkan)

- 4) Merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan satu tahun ke depan.
- 5) Merumuskan tujuan tahunan/tujuan jangka pendek (sasaran)
- 6) Mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya.
- 7) Melakukan analisis SWOT (mengenali tingkat kesiapan masing-masing urusan sekolah, melalui analisis SWOT).
- 8) Menyusun langkah-langkah pemecahan persoalan, yaitu mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan urusan sekolah
- 9) Menyusun rencana program sekolah
- 10) Menentukan milestone (output apa dan kapan dicapai)
- 11) Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana)
- 12) Menyusun rencana pelaksanaan program
- 13) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi
- 14) Membuat jadwal pelaksanaan program
- 15) Menentukan penanggungjawab program/kegiatan.

Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika menyusun Renop sekolah adalah:

- 1) Menggunakan strategi analisis SWOT.
- 2) Analisis SWOT dilakukan setiap tahun.
- 3) Renop merupakan penjabaran dari Renstra.
- 4) Program yang direncanakan lebih operasional.
- 5) Ada benang merah antara tujuan lima tahunan dan sasaran (tujuan) satu tahunan.
- 6) Rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT.

3.6 Beberapa Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pada beberapa model MBS yang dikemukakan di sini menunjukkan kemiripan di beberapa negara. Di suatu negara MBS hanya menekankan satu atau beberapa aspek, seperti di Hong Kong menekankan inisiatif sekolah, di Kanada menekankan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah, di Amerika Serikat menekankan pengelolaan sekolah di tingkat sekolah itu sendiri, dan di Inggris menekankan pengelolaan dana pada tingkat sekolah. Sementara itu, di Australia model Manajemen Berbasis Sekolah adalah dengan memberi kewenangan sekolah dalam hal kurikulum, fleksibilitas penggunaan sumber daya sekolah, dan beberapa alternatif

pengelolaan sekolah. Di Prancis MBS memberikan partisipasi yang lebih besar pada badan pengelola sekolah. Sementara itu, di Nikaragua model MBS dengan munculnya sekolah otonom dalam hal personel, anggaran, kurikulum, dan pedagogi. Ada pula model MBS yang memfokuskan pada anggaran yang berbasis di sekolah (School-Based Budget) seperti di Selandia Baru. Pelibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah menjadi pilihan model MBS di El Salvador. Di Madagaskar MBS difokuskan pada tingkat pendidikan dasar dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Sementara itu, model MBS di Indonesia menekankan pada mutu yang dikenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Model MPMBS memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua model MBS yang muncul mengarah pada satu titik, yaitu meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan. Munculnya model MBS di tiap-tiap negara tak terlepas dari sejarah pendidikan negara tersebut. Mulanya terdapat kelemahan pada bidang tertentu yang kemudian difokuskan untuk ditingkatkan kinerjanya. Beberapa negara cukup jeli dalam menganalisis kelemahannya sehingga mampu membuat model MBS secara jelas dan fokus, namun di beberapa negara model MBS kurang fokus dan melebar.

Bahwa sebelum diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengelolaan sekolah ditentukan dan dikontrol oleh pihak luar sekolah. Sumber daya internal sekolah saat itu tidak memiliki peran yang berarti karena dianggap tidak mampu. Namun, sejak diterapkannya MBS peran sumber daya internal di sekolah diberdayakan dengan sungguh-sungguh. Pengelolaan sekolah yang dijalankan dengan adanya kontrol dari luar sekolah disebut external control management atau manajemen kontrol eksternal (MKE).

Dalam manajemen kontrol eksternal ini setiap pengambilan keputusan ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa melibatkan pihak sekolah secara langsung. Sekolah sebagai institusi yang melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh birokrasi di atasnya. Faktanya selama diterapkan MKE itulah tidak pernah terjadi perbaikan kualitas pendidikan. Saat itu sekolah harus mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang kaku dan sering kali tidak sesuai dengan keinginan dan hati nurani para pelaksana di sekolah.

3.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terkait MBS

Di dalam Permendikbud No. 47 thn 2023. Disebutkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat MBS/M adalah bentuk otonomi manajemen

pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam mengelola kegiatan pendidikan. Standar Pengelolaan pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam mengelola potensi dan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

Pada Pasal (3) disebutkan bahwa Standar Pengelolaan pendidikan meliputi: a. perencanaan kegiatan pendidikan; b. pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan c. pengawasan kegiatan pendidikan. Standar Pengelolaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada: a. pendidikan anak usia dini; b. jenjang pendidikan dasar; dan c. jenjang pendidikan menengah. Standar Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan MBS/M. Pada pasal (4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pengelolaan sistem informasi.

Pada Bab II Tentang Perencanaan Kegiatan Pendidikan di bagian Kesatu Umum Pasal 4: Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan berpedoman pada visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan. Hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan, proses pembelajaran, dan hasil belajar Peserta Didik.

Perencanaan kegiatan Pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah/madrasah. Pada Pasal 5 disebutkan:

- a) Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja Satuan Pendidikan.
- b) Rencana kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:
 - a. rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan b. rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- c) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah.
- d) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan cara:
 1. identifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas;
 2. refleksi untuk menemukan akar masalah yang akan diintervensi; dan
 3. menyusun program sebagai solusi untuk setiap masalah.
- e) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.
- f) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

menggambarkan tujuan pencapaian mutu lulusan dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.

- g) Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melaporkan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan untuk mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan.
- h) Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melaporkan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan untuk mendapat persetujuan dari penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Pada Pasal 6 Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:

- a. Kurikulum dan pembelajaran;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Sarana dan prasarana; dan
- d. Penganggaran.

Pada Pasal 22 dijelaskan:

- a) Penerapan MBS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertujuan mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang aman, menyenangkan, inklusif, memperhatikan kesetaraan gender, dan berkebinekaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
- b) Penerapan MBS/M ditunjukkan dengan:
 - 1. kemandirian Satuan Pendidikan dalam mengelola dan mengatur dirinya sendiri;
 - 2. kemitraan Satuan Pendidikan berupa kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, orang tua atau wali, komunitas belajar, organisasi mitra, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
 - 3. partisipasi masyarakat secara aktif berupa pelibatan masyarakat serta penguatan peran dan kapasitas orang tua atau wali, komunitas belajar, organisasi mitra, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 4. keterbukaan Satuan Pendidikan untuk menyediakan akses informasi publik terkait penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai jalur komunikasi; dan
 - 5. akuntabilitas Satuan Pendidikan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada pihak terkait.

Pada Pasal 23 disebutkan bahwa Penerapan MBS/M dalam pengelolaan kegiatan pendidikan di Satuan Pendidikan dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan dibantu oleh guru dan komite sekolah/madrasah.

3. 8. Monitoring Atas Rencana Pengembangan Sekolah Berbasis MBS

Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi merupakan bagian tak terpisahkan dari pengawasan/supervisi klinis rutin untuk memantau kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Program MBS merupakan model program peningkatan kualitas pendidikan yang meletakkan sekolah sebagai ‘pusat’ dari pelaksanaan pembelajaran. Untuk membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan langkah yang tepat, dibutuhkan supervisi klinis dari pengawas sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya yang secara teratur memberikan umpan balik dan tindak lanjut baik dalam bentuk pembinaan maupun pantauan terhadap perkembangan sekolah. Untuk memberikan umpan balik (feedback) terhadap proses perencanaan dan penganggaran pendidikan.

Sebagai program nasional pemerintah Republik Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), Program MBS harus menjadi bagian dari program pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, Program MBS harus secara teratur dan sistematis tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah (contohnya Renstra/RPJMD atau RKPD) dan dianggarkan setiap tahunnya.

Hasil Monitoring dan Supervisi bisa menjadi bahan rujukan untuk mengetahui kondisi sekolah, tingkat kemajuan, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan MBS yang akan menjadi umpan balik (feedback), memberikan orientasi arah kebijakan dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi MBS di wilayahnya. Sebagai rujukan dalam melakukan advokasi dan komunikasi pendidikan berdasarkan bukti nyata (evidence based). Hasil MBS yang berkualitas dapat menjadi referensi yang akurat dan terpercaya (reliable) yang dapat menjadi alat advokasi yang strategis dalam mempromosikan Program MBS ke berbagai kalangan, baik itu kalangan pemerintahan sebagai pengambil keputusan, atau pun kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan penganggaran. Rencana Pengembangan Sekolah berbasis MBS semakin nyata dibutuhkan oleh setiap sekolah. Peran pimpinan sekolah

adalah sebagai manajer, juga pelaksana supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Di dalamnya terdapat fungsi manajerial untuk menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rencana Pengembangan berbasis data menjadikan sekolah sebagai tempat berkembangnya potensi siswa yang nyaman dan didukung oleh guru dan sarana penunjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, FA Pasha dan Fajar Azzam. "Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SD di Kecamatan Tambun Selatan." *Parameter* 7, no. 1, 2022.
- Arikunto, Suharsimi dan Yuliana, Lia. *Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media. Berbasis Sekolah. Jakarta, 2008*
- Bernadeta Nadeak, *Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung, Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.*
- Dikmenum Depdiknas, *Panduan Monitoring dan Evaluasi dalam Manajemen Peningkatan Mutu, 2001.*
- H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan, Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ketiga, 1998..*
- Indrawan, Irjus. *Pengantar Manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yogyakarta: Deepublish, 2015.*
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta, Penerbit Grasindo, 2003.*
- Sudiro, Achmad. *Perencanaan sumber daya manusia, Universitas Brawijaya Press, 2011.*
- Suprpti, Sri. *Rencana Pengembangan Sekolah di Era Milenial, Yogyakarta, CV Ananta Vidya, 2023.*
- Supriono Subakir dan Achmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah, Surabaya: Penerbit SIC, 2001*
- Susan Albers Mohrman et.al, *School-Based Management: Organizing for High Performance, San Francisco: Josey Bass, 1994.*
- Tarsan, Vitalis. "Rencana Pengembangan Sekolah dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 10, no. 1 (2018).
- Riduwan, *Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta., 2014.*
- Riesta Devi Kumalasari, *Stakeholder Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Binus.ac.id – <https://bit.ly/39sAEFS>*
- Wijaya, Irwanda Ardhi. Rosida Apriliana Shahirah, and Margartha Evi Yuliana. "Analisis Pengaruh Komunikasi Dan Kerjasama Tim Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2022).
https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-catat-436707-sekolah-di-in_donesia-pada-20232024, diakses pada tanggal 25 April 2024.
https://www.academia.edu/10188377/Contoh_Makalah_RPS, diakses tanggal 25 April 2024